

1.400 Polisi Diturunkan Kawal Aksi Buruh dan KSPI di Patung Kuda Jakpus

JAKARTA (IM) - Ribuan polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi massa yang dilakukan massa dari Partai Buruh dan KSPI, di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, sebanyak 1.400 petugas akan diturunkan untuk mengamankan aksi ini.

"Ada 1.400 personel segera tersebar di beberapa titik hari ini," kata Komarudin saat dihubungi, Rabu (26/7).

Berdasarkan informasi yang diterima, kata Komarudin, aksi tersebut akan dihadiri berjumlah sekitar 500 orang.

"Bukan unjuk rasa. Mereka mau hadir sidang

MK (Mahkamah Konstitusi, red) soal omnibus law," tutur Komarudin.

Lebih lanjut, terkait pengalihan jalan, Komarudin mengatakan pihaknya akan menutup Jalan Medan Merdeka Utara dan sebagian Jalan Medan Merdeka Barat.

"Dari Patung Kuda ke Harmoni tetap kami buka. Dari Harmoni sebaliknya kami tutup sementara," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, massa dari Partai Buruh dan KSPI akan menyampaikan tiga tuntutan yakni mencabut Omnibuslaw UU Cipta Kerja, kedua, menuntut upah minimum pada 2024 sebesar 15 persen dan yang terakhir menuntut untuk dicabutnya UU Kesehatan. • lus

Kelompok Begal Sadis yang Beraksi di Kawasan Cilandak Ditangkap

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap komplotan begal sadis yang beraksi di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (25/7). Tiga dari empat pelaku masih berusia di bawah umur, kini ditahan Polisi.

"Diduga para pelaku melukai korban dengan cara membacok sajam jenis celurit ke arah korban kemudian mengambil kendaraan roda 2 dan handphone milik korban," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key, Rabu (26/7).

Menurutnya, korban RR (17) dan JF (17) awalnya saling berboncengan menaiki sepeda motor melintasi Jalan Pondok Labu, mendadak terdapat segerombolan pelaku berinisial MRP (15), RPI (15), NRP (15), dan ASFR (20) mengejar. Korban yang panik dikejar segerombolan remaja itu menabrak tembok rumah warga.

Dia menerangkan, korban JF menyelematkan

diri dari kejaran pelaku, sedangkan RR jatuh terlempang. Pelaku lantas membacok korban sebanyak 3 kali mengenai pantatnya hingga luka sobek dan di waktu yang sama pelaku lainnya mengambil handphone dan motor korban.

"Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku MRP perantaraan eksekutor atau membacok, RPI mengambil motor, NRP mengambil handphone, dan ASFR menyediakan senjata tajam dan menjual handphone milik korban," tuturnya.

Kini, tambah Wahid, para pelaku dikenakan Pasal 365 (1) KUHP sub Pasal 170 (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan atau pengeroyokan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 sepeda motor hasil curiannya itu, 1 handphone, 1 kardus handphone, dan 1 celurit. • lus

KASUS TPPU PANJI GUMILANG

Dua Komisaris PT SBMK Mangkir dari Pemeriksaan Bareskrim Polri

JAKARTA (IM) - Dua komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana (SBMK), AF dan MY, mangkir dari pemeriksaan Bareskrim Polri. Sejatinya keduanya akan diperiksa sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi, dan penggelapan dana, yang dikelola pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang (PG), Rabu (26/7).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, dua saksi dari PT SBMK tidak hadir.

"Terkait 2 saksi dari PT Samudra Biru Mangun Kencana. Kedua saksi tersebut hari ini tidak hadir," kata Ramadhan dalam keterangan video yang diterima wartawan, Rabu (26/7).

Kedua saksi, AF dan MY, yang menjabat sebagai Komisaris PT SBMK, telah meminta agar pemeriksaan diubah menjadi Jumat (28/7). Penundaan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya.

"Sesuai surat penundaan yang dikirim oleh penasihat hukum yang bersangkutan akan hadir dan bersedia hadir pada hari Jumat 28 Juli 2023," kata Ramadhan.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim telah mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), korupsi hingga penggelapan yang diduga dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Dugaan tindak pidana TPPU, korupsi hingga penggelapan itu terkait pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana zakat di Ponpes Al Zaytun.

"Dari hasil koordinasi dan analisis transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi

pan, tindak pidana korupsi dana BOS hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG," kata Ramadhan dalam keterangannya pada 21 Juli 2023.

Panji Diperiksa Lagi Sementara itu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil Panji Gumilang, Kamis (27/7). Ia diperiksa terkait dugaan penistaan agama.

"Terhadap saudara PG telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada hari Kamis 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7).

Diketahui, Bareskrim Polri pada Senin (3/7) lalu sudah memeriksa Panji Gumilang. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023.

Kemudian, NII Crisis Center juga telah melaporkan Panji Gumilang, terkait kasus dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri pun menerima laporan dari NII Crisis Center tersebut dengan registrasi Nomor: LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI 27 Juni 2023

Panji dilaporkan sebagaimana dengan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANTARA



PENYELUNDUPAN 19,896 KG SABU-SABU DARI MALAYSIA

Polisi menghadirkan tersangka saat pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu di Polresta Bareleng, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (26/7). Satuan Reserse Narkoba Polresta Bareleng menggagalkan penyelundupan 19,896 kg sabu-sabu asal Malaysia dan menangkap tiga orang tersangka di perairan Nongsa, Batam.

Polri Menyebut Masa Berlaku SIM Masih Sangat Relevan Diterapkan

Pembatasan masa berlaku SIM 5 tahun berorientasi pada upaya untuk mengevaluasi kesehatan dan kompetensi mengemudi pemegang SIM.

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Selasa (25/7). Permohonan tersebut diajukan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat.

Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian, yang diwakili oleh Kasespim Lemdiklat Polri, Irfan Chryshanda Dwilaksana dan sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra yang digelar secara luring.

Dalam persidangan yang digelar di MK pada Rabu (10/5) lalu, Arifin mengatakan, setiap lima tahun sekali ia harus memperpanjang Surat Izin Mengemudi

(SIM). Arifin merasa dirugikan apabila harus memperpanjang SIM setelah masa berlakunya habis atau mati setelah 5 tahun.

Irfan Chryshanda dalam kesaksiannya mengatakan, tidak ada perdebatan mengenai masa berlaku SIM.

"Dapat dipahami mengingat norma mengenai masa berlaku SIM selama lima tahun, dan dapat diperpanjang seandainya sudah ada diatur dalam RUU LLAJ dibahas pada 2008 yang diatur dalam Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (PP 44/1993) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari rezim UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ," kata Chryshanda, seperti dilansir dari website resmi MK, Rabu

(26/7).

Menurut Eks Dirkamsel Korlantas Polri itu, hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dalam naskah akademik RUU LLAJ yang dimaksudkan untuk mengkaji kewenangan dan substansi yang masih relevan di bidang LLAJ, yang dikaitkan dengan perkembangan otonomi daerah dan tuntutan kebutuhan yang akan datang. Sehingga ketentuan di bidang LLAJ sudah ada dan dinilai masih relevan tidak lagi diperdebatkan terkait masa berlaku SIM.

Pengaturan SIM selama lima tahun dalam UU LLAJ saat ini sejatinya mengembangkan politik hukum penormaan mengenai masa berlaku SIM yang sejak Wegverkeers ordonnantie (WVO) diatur dalam peraturan di level undang-undang. Hal ini tentu sejalan dengan ruang lingkup naskah akademik RUU LLAJ yang berfokus untuk melakukan penambahan materi baru yang belum dimuat pada undang-undang Nomor 14/1992. Dalam hal termasuk muatan masa berlaku SIM

yang sebelumnya tertuang dalam Pasal 214 PP 44/1993 untuk kemudian dituangkan pada Pasal 85 ayat 2 UU LLAJ.

Pembatasan masa berlaku SIM berorientasi pada upaya untuk mengevaluasi Kesehatan dan kompetensi mengemudi pemegang SIM. Bila pada 1933 sudah memiliki politik hukum yang berorientasi pada Kesehatan berlalu lintas dengan yang berorientasi pada Kesehatan berlalu lintas dengan apakah hari ini akan terjadi kemunduran politik hukum keselamatan berlalu lintas dengan menghapus masa berlaku sim?

"Masa berlaku SIM masih sangat relevan diterapkan," jelas pria yang berpengalaman dalam bidang lintas ini.

Sedangkan untuk menyipakan pengemudi dengan

kualifikasi kompetensi yang baik dalam mengemudi, UU LLAJ mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, di samping persyaratan administratif juga persyaratan usia, kesehatan dan uji kompetensi.

Kemudian untuk menjamin keberlanjutan kualifikasi pengemudi yang mampu mewujudkan lalu lintas berkeselamatan, UU LLAJ mengharuskan dua hal yaitu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesehatan dan kemampuan mengemudi pemegang SIM melalui perpanjangan. Serta adanya pengawasan terhadap perilaku patuh dan tertib berlalu lintas dari setiap pemegang SIM melalui pemberlakuan sistem penandaan SIM. • lus

Cari Musuh Tak Ketemu, Geng Motor di Sukabumi Bacok Pedagang Nasi Goreng

SUKABUMI (IM) - Pedagang nasi goreng menjadi objek kebrutalan geng motor, korban yang sedang nongkrong di dekat gerobak lapak jualannya,

diserang secara tiba-tiba oleh tiga orang yang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Pelabuhan II, tepatnya di depan Terminal dan Pasar Lembursitu, Kelurahan dan Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Selasa (25/7) sekitar pukul 21.16 WIB malam.

Menurut keterangan beberapa saksi yang ada di lokasi di kejadian, awalnya kelompok geng motor tersebut mendatangi mini market yang berada di seberang tempat kejadian perkara (TKP). Mereka bertanya ke pegawai toko tersebut dan menanyakan anak-anak yang nongkrong sebelumnya.

Karena tidak menemukan yang mereka cari, lalu kelompok geng motor tersebut mendatangi lapak penjual gorengan dan nasi goreng yang berada di seberangnya. Pedagang nasi goreng yang sedang nongkrong bersama warga lainnya berjumlah empat orang lalu diserang menggunakan senjata tajam.

Pedagang nasi goreng yang menjadi korban, Miftah (30) mengatakan, dirinya yang sedang nongkrong bersama anak-anak warga sekitar di warung sebelah lapak berjualannya, tiba-tiba didatangi oleh kelompok geng motor yang membawa senjata tajam.

"Tiba-tiba aja sih pak, kebetulan rame, lagi nongkrong di warung sebelah sama anak-anak, biasa cuma duduk-duduk, tiba-tiba dua orang nyerang bawa samurai. Pastinya sih ga tau cuma yang turun dua orang, yang satu nunggu di motor," ujar Miftah kepada wartawan.

Lebih lanjut Miftah yang merupakan warga Tegal Jawa Tengah tersebut mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti jumlah dari kelompok geng

motor yang datang tersebut, namun saat di jalan terlihat bergerombol dan seperti sedang mencari kelompok lain.

"Kebetulan saya lagi nongkrong empat orang sama saya, saya posisinya paling depan depan pintu, yang pertama diserang saya, yang tiga kan depan saya pada lari, saya mau lari tubrukan, saya jatuh posisi terlentang, kaki saya yang kena sabetan," ujar Miftah yang sudah lama merantau dan mengontrak di Lembursitu tersebut.

Miftah yang beberapa kali diserang sabetan senjata tajam sempat mengelak, seperti yang terjadi pada sabetan yang mengarah ke punggungnya. Namun saat terjatuh dirinya tidak bisa mengelak hingga bagian telapak kakinya luka akibat sabetan senjata tajam.

"Pelaku tidak terlihat jelas karena mereka pakai masker dan sweater. Menggunakan motor bebek tapi ga tau jenis apa. Langsung (datang) bawa samurai, langsung (bilang) 'woy siapa yang nongkrong' ga tau ya udah langsung ini aja. Harapan saya, semoga lekas diberesin tuh aja geng motornya, ditindak tegas aja kalo bisa mah," ujar Miftah.

Sementara itu Kapolsek Lembursitu Polres Sukabumi Kota, AKP Agus Suherman mengatakan, setelah ada kejadian ini dari pihak Polsek Lembursitu berupaya sekali untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti.

"Anggota masih di lapangan dalam penyelidikan. Mudah-mudahan ada titik terang dan kita berdoa semuanya supaya cepat tertangkap, tapi alhamdulillah korban tidak begitu parah sehingga dia bisa langsung pulang," ujar Agus.

Harapannya, lanjut Agus, ke depannya gerombolan itu sadar diri dan minta dukungan dari masyarakat untuk memberantas geng motor dengan menginformasikan atau melaporkan setiap ada perkembangan atau ada hal-hal yang kira-kira mencurigakan. • lus

Divisi Hubinter Polri Dalam Informasi Keberadaan Harun Masiku di Kamboja

JAKARTA (IM) - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri bakal mendalami informasi terkait keberadaan buronan Harun Masiku berada di Negara Kamboja.

"Kami akan tindak lanjut," kata Kadiv Hubinter Polri, Irfan Krishna Murti kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (26/7).

Untuk mendalami informasi itu, Krishna menyebutkan pihaknya bakal bekerja sama dengan KPK dan Interpol serta otoritas dari Negara Kamboja.

"Kerja sama dengan KPK dan Interpol serta otoritas Kamboja," ujar Krishna.

Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulisan proses Pergantian

Antar Waktu (PAW) anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Ketiganya adalah Wahyu Setiawan merupakan mantan Komisisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agustiani Tio Fridelina merupakan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, serta pihak swasta bernama Saeful.

Harun Masiku lolos dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya. Dia kemudian ditetapkan sebagai buron KPK pada Januari 2020. Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, bila Harun Masiku melewati jalur perlintasan imigrasi resmi, maka keberadaannya pasti

akan terdeteksi.

"Dan terkait dengan DPO dari HM ya kami sampaikan sekali lagi bahwa selama HM melintas di perlintasan resmi Imigrasi di seluruh negara maka HM tersebut pasti terdeteksi," kata Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Selasa (7/3).

Ia menyakan bahwa Harun Masiku telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau red notice.

"Sejauh ini red Notice atas nama HM yang sudah disebar melalui jalur komunikasi 1-24/7 Interpol," ujar Ramadhan.

Ramadhan memastikan, Interpol Indonesia sama sekali belum menerima informasi apapun tentang lokasi persembunyiannya dari Harun Masiku. "Indonesia belum menerima respon atau informasi dari negara negara yang dimungkinkan tempat yang bersangkutan bersembunyi," ucap Ramadhan. • lus



EVAKUASI DELAPAN PENAMBANG EMAS TERJEBAK DI BANYUMAS

Aparat berjaga di lokasi evakuasi delapan penambang yang terjebak dalam lubang galian tambang emas sedalam 60 meter, di Desa Pancurendang, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (26/7). Upaya penyelamatan terus dilakukan terhadap delapan penambang yang terjebak di dalam lubang galian tambang emas akibat kebocoran sumur yang menyebabkan air menggenangi sumur sejak Selasa (25/7) pukul 22.00 WIB.